

Dari Pintu Terbuka ke Repatriasi: Pergeseran Kebijakan Turki terhadap Pengungsi Suriah

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2024, Vol. 14, No. 2: 201-226
[https://journal.uinsgd.ac.id/
index.php/jispo/index](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index)
© The Author(s) 2024

Khoirul Amin*

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Lieneke Jihan Sarmila

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Abstract

This article discusses the shift in Turkey's foreign policy regarding the repatriation of Syrian refugees to their home country. Since 2011, Turkey has hosted the largest number of refugees in the world, initially implementing an open-door policy. However, in 2019, this policy shifted towards refugee repatriation. This study analyzes this policy change using the Foreign Policy Change approach by Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis, considering both domestic and international structural parameters. The research employs a qualitative methodology with a descriptive approach. The findings indicate that Turkey's policy shift was driven by domestic factors—including social, economic, and political aspects—as well as international factors, such as the strained relations between Turkey and the European Union and the impact of U.S. dollar inflation on Turkey's economy and the living conditions of refugees.

Keywords

Foreign policy changes, Turkiye, repatriation, Syrian refugees

Abstrak

Artikel ini membahas perubahan kebijakan luar negeri Turki terkait repatriasi pengungsi Suriah ke negara asal mereka. Sejak 2011, Turki menjadi negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia, yang awalnya menerapkan kebijakan pintu terbuka. Namun, pada 2019,

* Corresponding author:

Khoirul Amin, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia
Alamat: Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kalimantan Timur
Email: ka163@umkt.ac.id

kebijakan tersebut bergeser menuju repatriasi pengungsi. Penelitian ini menganalisis perubahan tersebut menggunakan pendekatan Perubahan Kebijakan Luar Negeri dari Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis, dengan mempertimbangkan parameter struktural domestik dan internasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan Turki dipengaruhi oleh faktor domestik—termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik—dan faktor internasional seperti dinamika hubungan Turki-Uni Eropa yang penuh ketegangan dan dampak inflasi dolar AS terhadap perekonomian Turki dan kondisi pengungsi.

Kata-kata Kunci

Perubahan kebijakan luar negeri, Turki, repatriasi, pengungsi Suriah

Pendahuluan

Turki sedang mengalami krisis pengungsi karena masuknya pengungsi terus meningkat sejak tahun 2011. Masuknya pengungsi ke Turki disebabkan oleh letak geografisnya yang cukup strategis bagi para pengungsi sebagai jalur alternatif menuju negara-negara Eropa. Turki juga merupakan negara yang telah menyetujui Konvensi Jenewa 1951 atau disebut sebagai “Convention Relating to the Status of Refugees”. Perjanjian tersebut berisi tentang penegakan hak asasi manusia dan peraturan yang mengatur suatu negara yang menyetujui perjanjian tersebut untuk menegakkan hak asasi manusia seorang pengungsi agar diberikan perlindungan yang layak. Selain itu, partai Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) berperan bagi masuknya pengungsi di mana mereka sangat mempengaruhi pemerintahan Turki dengan membawa perbaikan dari segi sosial, ekonomi dan politik (Rofii 2018). Partai AKP berupaya membawa politik Turki untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Salah satu syarat untuk dapat menjadi anggota Uni Eropa adalah suatu negara harus demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, Turki memiliki kewajiban untuk menerima para pengungsi yang melarikan diri dari Suriah, dengan menerapkan kebijakan yang dibuat oleh partai AKP tentang kebijakan ‘Pintu Terbuka’ bagi para pengungsi Suriah (Syukran and Ubaidullah 2019). Akibatnya, banyak pengungsi yang masuk ke wilayah Turki untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik.

Pengungsi di Turki terbagi menjadi dua macam. Pertama, pengungsi yang hanya menetap untuk mendapatkan perlindungan suaka sementara dan nantinya akan meninggalkan tersebut apabila kondisi di negara asalnya sudah lebih stabil dan aman. Kedua, pengungsi yang datang ke Turki sebagai tempat transit untuk melanjutkan perjalanan mereka ke negara-negara Eropa atau Asia (Rosyana and Dermawan 2020). Perbedaan pengungsi tersebut didasarkan pada evolusi kebijakan Turki. Sesuai dengan dasar kebijakan Turki terhadap pengungsi, terdapat kriteria dalam menentukan batas suaka di wilayahnya sesuai dengan undang-undang pemukiman Turki tahun 1934, konvensi pengungsi tahun 1951, undang-undang suaka dan regulasi tahun 1994. Namun, kebijakan Turki tersebut menyebabkan banyaknya pengungsi yang masuk ke Turki dengan gelombang yang melambung tinggi dari tahun ke tahun (Tumen 2023).

Meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Turki mendapat respon negatif dari penduduk lokal Turki karena peningkatan jumlah penduduk tersebut telah mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan angka kriminalitas serta pengangguran. Hal ini mengakibatkan penduduk lokal menolak kehadiran para pengungsi (anti pengungsi). Selain itu, krisis mata uang dan utang nasional pada tahun 2018 menyebabkan terjadinya inflasi. Berdasarkan data terakhir yang berhasil dihimpun oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pada tahun 2019, jumlah pengungsi di Turki mencapai sekitar 3.691.333 orang yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengungsi Suriah di Turki (UNHCR 2019). Kebijakan yang dilakukan oleh Turki dalam melindungi para pengungsi meliputi bidang pelayanan nasional berupa berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan berbagai pelayanan sosial lainnya. Para pengungsi yang datang ke Turki memiliki berbagai implikasi bagi negara, banyaknya jumlah pengungsi di Turki menimbulkan permasalahan bagi negara dalam bidang ekonomi politik dan keamanan. Pada sektor ekonomi, Turki mengeluarkan dana sebesar 4,5 miliar dolar untuk penanganan pengungsi bagi 2,7 juta orang. Krisis pengungsi Suriah memengaruhi kebijakan negara Turki karena dianggap sebagai beban negara karena menampung terlalu banyak pengungsi. Berbagai implikasi negara yang dirasakan Turki pada tahun 2019 mengakibatkan perubahan kebijakan pengungsi untuk mengatasi krisis pengungsi yang sedang berlangsung (Izzatinnisa 2022).

Karena itu, pada 2019, pemerintah Turki menerapkan kebijakan repatriasi, yakni pemulangan pengungsi Suriah ke negara asal mereka yang dimulai sejak bulan Agustus di tahun itu. Isu ini menarik untuk dikaji untuk melihat lebih dalam pengaruh perubahan kebijakan luar negeri Turki soal pengungsi ini yang berubah dari akomodatif ke kontradiktif.

Kajian mengenai kebijakan Turki terhadap pengungsi telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Rosyana dan Dermawan (2020) dalam studi mereka yang berjudul “Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki: Studi Kasus Serangan Rojava 2019” menyoroti bahwa kedatangan pengungsi merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dibuat oleh Turki sendiri. Kebijakan ini digunakan untuk membangun citra Neo-Ottoman sebagai pelindung ‘saudara Muslim,’ yang menunjukkan bagaimana politik identitas berperan dalam kebijakan luar negeri Turki.

Sementara itu, Delfira (2019) dalam penelitian berjudul “Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Imigran” mengkaji kebijakan luar negeri Turki terkait perizinan imigran, khususnya dalam kerangka The Law on Foreigners and International Protection (LFIP). Undang-undang ini mengatur aspek perizinan bagi pengungsi agar mereka dapat memperoleh perlindungan di Turki.

Dari perspektif kepentingan nasional, Syukran dan Ubaidullah (2019) dalam penelitian mereka yang berjudul “Dampak Kebijakan Pintu Terbuka (*Open Door Policy*) Turki bagi Pengungsi Suriah terhadap Kepentingan Nasional Turki Tahun 2011-2016” membahas implikasi kebijakan pintu terbuka terhadap ekonomi, politik, dan sosial di Turki. Studi ini menunjukkan bahwa biaya besar yang dikeluarkan untuk menampung pengungsi berdampak pada kestabilan ekonomi yang tidak menentu serta menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Selain itu, Ulfah (2022) dalam penelitian berjudul “Faktor-Faktor Kegagalan Kerja Sama Uni Eropa (EU) dan Turki dalam Menangani Krisis Pengungsi di Benua Eropa” menyoroti dinamika kerja sama antara Turki dan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi melalui *Joint Action Plan*. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa kesalahpahaman serta ketidakkonsistenan dalam memenuhi kesepakatan menjadi faktor utama kegagalan kerja sama. Benturan kepentingan nasional antara kedua pihak turut memperburuk situasi, menyebabkan kebuntuan dalam implementasi kebijakan perlindungan pengungsi.

Dalam kajian yang lebih luas mengenai hubungan Turki dan Uni Eropa, Sholihin dan Alfian (2021) dalam penelitian berjudul “Bumerang Kerja Sama EU-Turkey Joint Action Plan dalam Penanganan Krisis Pengungsi bagi Turki” membahas bagaimana tata kelola pengungsi Suriah di Turki menjadi bagian dari strategi kebijakan luar negeri negara tersebut. Turki, yang awalnya menerapkan kebijakan *open door policy* dengan dukungan bantuan dari Uni Eropa, justru menghadapi beban besar dalam menampung dan memfasilitasi pengungsi. Studi ini menyoroti bagaimana Turki memanfaatkan pengungsi sebagai alat diplomasi untuk menekan Uni Eropa, tetapi pada akhirnya kebijakan ini menjadi bumerang yang membebani negara tersebut secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan fokus pada analisis lebih rinci terhadap faktor domestik dan internasional yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki. Jika sebelumnya kebijakan Turki terhadap pengungsi bersifat akomodatif, penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan tersebut bertransformasi menjadi lebih restriktif. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana Turki telah melaksanakan kebijakan repatriasi pengungsi sebagai bagian dari strategi politik dan kebijakan luar negerinya.

Masuknya Pengungsi ke Turki

Kehadiran pengungsi di Turki disebabkan oleh kebijakan Turki yang menerima pengungsi atas dasar kemanusiaan, selain Turki juga merupakan salah satu jalur utama menuju Eropa dan Asia sehingga kondisi geografisnya cukup strategis bagi para pengungsi Suriah. Banyak pengungsi yang masuk ke Turki karena melihat Turki telah membuat kebijakan terbuka bagi para pengungsi yang tertuang dalam landasan hukum kebijakan Turki terhadap pengungsi (Roynanda 2019). Dalam kebijakan terhadap pengungsi tersebut, pada awalnya disebutkan bahwa parameter bagi para pengungsi yang dapat menerima suaka Turki hanyalah para pengungsi yang memiliki ras yang sama. Namun, dengan adanya konvensi tahun 1951 yang telah disetujui oleh Turki membuat parameter kebijakan pengungsi tersebut ditambahkan dari segi geografi dan aspek kemanusiaan. Pemerintah Turki telah berjanji untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan para pengungsi Suriah. Selain itu, mereka bekerja sama

dengan berbagai lembaga internasional seperti UNHCR untuk memantau kamp-kamp pengungsian dan menyediakan layanan vital seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Makovsky 2019). Namun, para pengungsi Suriah di Turki kerap kali menghadapi permasalahan yang tidak mengesankan. Mereka kerap mengalami diskriminasi, kesulitan mendapatkan pekerjaan formal, dan ketidakpastian status hukum mereka. Meskipun demikian, perekonomian dan budaya Turki berkembang berkat banyaknya pengungsi Suriah.



Grafik 1 Jumlah Pengungsi di Turki Tahun 2011-2024

Sumber: UNHCR

Sebagaimana terlihat pada Grafik 1, pada tahun 2011 jumlah pengungsi yang memasuki Turki masih relatif rendah, sebanyak sekitar 99.500 orang, karena situasi konflik di Suriah masih dalam tahap awal. Namun, pada 2012 para pengungsi yang masuk ke Turki mengalami peningkatan menjadi sekitar 180.000 orang karena meningkatnya tindak kekerasan di Suriah. Pada tahun 2013 Turki menerima pengungsi yang masuk sekitar 600.000 orang, jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada 2014 jumlah pengungsi terus bertambah hingga mencapai 1.600.000 orang, peningkatan jumlah pengungsi yang sangat signifikan. Turki menampung sekitar 2.500.000 orang pada tahun 2015 dan sebagian besar asal para pengungsi tersebut berasal dari negara Suriah.

Selama adanya krisis pengungsi di Eropa, jumlah pengungsi yang masuk ke Turki meningkat cukup pesat hingga mencapai jutaan orang setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat sekitar 2.900.000 orang yang masuk ke Turki. Tahun 2017 para pengungsi yang masuk berjumlah

sekitar 3.400.000 orang yang mana kenaikan jumlah pengungsi tersebut tidak terlalu banyak seperti tahun sebelumnya. Selain itu, Turki juga menerima para pengungsi yang melarikan diri karena konflik sipil di Irak dan Afghanistan sehingga adanya peningkatan pengungsi yang masuk pada 2018 menjadi berjumlah sekitar 3.600.000. Hingga pada tahun 2019, Turki menampung sekitar 3.691.333 orang pengungsi, yang mana jumlah tersebut tak hanya disebabkan oleh pengungsi yang meninggalkan negaranya karena konflik saja melainkan juga karena adanya sebuah krisis di wilayah sekitar (UNHCR 2019). Pada tahun 2019, UNHCR mengatakan bahwa Turki menjadi tempat untuk para pengungsi untuk tinggal yang membawa Turki menjadi negara yang memiliki populasi pengungsi terbesar di dunia. Sekitar 98% pengungsi di Turki tinggal di wilayah perkotaan dan di pusat akomodasi sementara seperti kemp yang dibuat pemerintah (Pusparisa 2020).

Para pengungsi yang memiliki izin tinggal dapat hidup menyebar di berbagai wilayah Turki. Pemberian status kewarganegaraan didapatkan para pengungsi bisa terjadi dengan adanya naturalisasi, yang bisa didapatkan dengan cara menetap di Turki selama lima tahun, melalui pernikahan dengan orang Turki, dan prosedur pengecualian pada keadaan tertentu. Menurut laporan dari Menteri Dalam Negeri Turki Muammer Guler, pemerintah Turki telah memberikan kewarganegaraan Turki kepada para pengungsi Suriah sampai tahun 2019 berjumlah 53.099 orang. Menurut data dari UNHCR (2019) yang telah diperbaharui pada 1 Desember 2019, total pengungsi Suriah yang tersebar di berbagai negara untuk mencari suaka perlindungan telah mencapai angka 5.661.341 juta jiwa. Turki menjadi negara yang paling banyak menerima pengungsi dengan jumlah 3.691.333 juta jiwa per 27 November 2019. Jumlah pengungsi pada tahun 2020 bertambah akibat terhambatnya pemberlakuan kebijakan repatriasi akibat pandemi COVID-19 sebanyak 3.759.817 pengungsi yang masuk ke Turki. Pada tahun 2021, jumlah pengungsi mengalami pengurangan menjadi 3.568.259 karena kebijakan repatriasi sudah diterapkan meskipun kondisi masih belum begitu stabil. Kemudian pada tahun 2022, terdapat 3.500.000 pengungsi. Di tahun 2023, pengungsi berjumlah 3.400.000 dan di tahun 2024 jumlah pengungsi menurun hingga 3.300.000 orang (UNICEF 2022).

Turki mengalami krisis pengungsi dalam jumlah yang besar dengan kenaikan pengungsi yang masuk di setiap tahunnya. Namun, setelah

adanya kebijakan repatriasi, terdapat penurunan secara bertahap pada tiap tahunnya yang dapat mengurangi atau meredam adanya lonjakan kenaikan pengungsi di Turki. Meskipun terdapat tantangan dalam repatriasi pengungsi, Turki berusaha merealisasikan kebijakan tersebut dengan mengkondisikan keadaan dengan tetap mementingkan keamanan serta kemanusiaan (UNHCR 2022).

Untuk meminimalisir krisis pengungsi serta beban ekonomi, Turki membentuk zona aman di Suriah untuk membuat kondisi yang aman bagi pengungsi Suriah yang ingin kembali ke negara asal mereka. Dengan program “Membantu Pengungsi Kembali ke Rumah”, Turki berusaha untuk membantu pengungsi Suriah yang ingin kembali ke tanah air mereka dengan selamat. Zona aman ini dirancang untuk memfasilitasi akses pengungsi Suriah ke tanah air mereka. Turki ingin mengatasi masalah keamanan di wilayah Suriah Utara, termasuk membersihkan zona teroris seperti YPG/PKK. Adanya zona aman diharapkan dapat melindungi perbatasan Turki dari ancaman teroris (Fawwaz 2020). Turki dan Amerika Serikat setuju untuk membuat zona aman di Utara Suriah dan membangun koridor perdamaian yang akan memudahkan warga Suriah yang ingin kembali ke rumah mereka. Dalam meningkatkan bantuan kemanusiaan, Turki membuat proyek zona aman untuk melindungi hak-hak jutaan perempuan dan anak di Suriah. Proyek itu juga diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi pengungsi di Turki, terutama menjelang pemilihan umum. Tujuan utama pembentukan zona aman di Suriah oleh Turki adalah untuk membuat pengungsi Suriah merasa aman, menyelesaikan masalah keamanan mereka, dan membantu mereka kembali ke rumah asalnya (UNHCR 2024).

Respon Turki Terhadap Pengungsi

Sejak awal, Turki memberikan respon yang proaktif dalam penerimaan pengungsi Suriah. Turki menggunakan kebijakan *open door policy* atau kebijakan “pintu terbuka” untuk menerima para pengungsi Suriah yang datang ke Turki. Pada awal 2011, Turki menerapkan kebijakan tersebut guna memberikan para pengungsi Suriah sebuah status perlindungan suaka sementara untuk memastikan pengembalian paksa bagi pengungsi dan pembatasan waktu tinggal di berusaha ditiadakan oleh pemerintah Turki. Namun, pada tahun 2014 pemerintahan Turki mengeluarkan UU migrasi baru tentang pemberlakuan status pengungsi bersyarat yang dikelola oleh General Directorate of Migration Management (GDMM). Pemerintah

awalnya menganggap kebijakan tersebut hanyalah sebuah kebijakan jangka pendek, tetapi seiring berjalannya waktu dan pengungsi yang masuk semakin bertambah dalam jumlah yang lebih banyak membuat pemerintah menjadikan kebijakan tersebut menjadi kebijakan jangka panjang (Syukran and Ubaidullah 2019). Dalam mengelola perizinan tinggal, pemerintah Turki telah mengatur dan menyediakan berbagai layanan untuk para pengungsi Suriah di mana para pengungsi yang sudah memiliki dokumen bahwa mereka resmi izin tinggal di Turki langsung diperbolehkan masuk ke dalam area wilayah di Turki. Namun, untuk para pengungsi yang masih belum memiliki dokumen yang lengkap tentang surat pengungsi, mereka hanya akan di tempatkan di kamp di area penampungan yang ada di Oncupinar.

Dalam penerimaan pengungsi terbuka tersebut pemerintah Turki memberikan fasilitas yang lengkap dari segi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta pangan mereka. Dapat dilihat bahwa Turki memfasilitasi para pengungsi dengan anggaran negara sendiri untuk memberikan kelayakan hidup bagi para pengungsi (Alifah and Widad 2022). Dengan ini, Turki menjadi sebuah negara yang sangat memperhatikan perlindungan untuk kelangsungan hidup para pengungsi.

Untuk menanggapi perubahan kondisi dan menyesuaikan diri dengan perubahan keamanan, Erdogan dan pemerintah Turki juga mengubah kebijakan repatriasi untuk mempercepat atau menunda repatriasi sesuai dengan perkembangan terbaru. Untuk memastikan bahwa kebijakan repatriasi Turki memenuhi standar internasional dan mendapatkan dukungan yang diperlukan, Turki terus berkomunikasi dengan komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan. Secara keseluruhan, tanggapan Erdogan terhadap masalah repatriasi pengungsi menunjukkan upaya Turki untuk mengelola krisis pengungsi dengan bertanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mencari solusi yang aman dan berkelanjutan bagi pengungsi (Voluntas 2019).

Perubahan Kebijakan Turki terhadap Pengungsi

Namun, untuk menanggapi perubahan kondisi dan menyesuaikan diri dengan perubahan keamanan, Erdogan dan pemerintah Turki melakukan kebijakan repatriasi untuk mempercepat atau menunda repatriasi sesuai dengan perkembangan terbaru. Untuk memastikan bahwa kebijakan

repatriasi Turki memenuhi standar internasional dan mendapatkan dukungan yang diperlukan, Turki terus berkomunikasi dengan komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan. Secara keseluruhan, tanggapan Erdogan terhadap masalah repatriasi pengungsi menunjukkan upaya Turki untuk mengelola krisis pengungsi dengan bertanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mencari solusi yang aman dan berkelanjutan bagi pengungsi (Voluntas 2019).

Perubahan ini terjadi semenjak Turki mendapat pasokan pendatang lebih banyak, khususnya pengungsi yang berasal dari Suriah yang terus meningkat. Bertambahnya penduduk pengungsi yang melonjak dari tahun ketahun membuat Turki mengeluarkan kebijakan baru untuk menstabilkan jumlah pengungsi yang datang berlebihan (Anissa 2021). Kebijakan perubahan Turki disebabkan oleh berbagai aspek salah satunya yakni adanya peningkatan biaya ekonomi untuk memfasilitasi kebutuhan untuk keamanan pengungsi tersebut. Namun, sebenarnya pemerintah mengetahui bahwa kebijakan ini dikeluarkan pada saat konflik di Suriah masih belum selesai, tetapi pemulangan pengungsi ke tempat asalnya tetap harus berjalan dari batasan waktu yang diberikan pada tahun 2019 itu. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menstabilkan jumlah penduduk yang datang sesuai kapasitas negara dan dengan ini penduduk yang tidak mempunyai surat penduduk dan izin direpatriasi ke tempat asalnya. Pecahnya krisis pengungsi di Eropa menjadi masalah tersendiri bagi Uni Eropa. Karena itu, mereka meminta Turki untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masuknya pengungsi ke Eropa (Olejárová and Barbora 2018).

Faktor Domestik

Perubahan kebijakan Turki melalui pemulangan kembali para pengungsi disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya tekanan domestik. Masyarakat lokal Turki merasakan beban atas peningkatan jumlah pengungsi yang masuk karena susahny mendapatkan pekerjaan, pendapatan hidup lebih rendah dari pengeluaran kebutuhan hidup dan infrastruktur yang kurang. Hal ini menjadi tekanan yang mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah penduduk. Dari sisi domestik, faktor ekonomi dan sosial berperan penting dalam perubahan kebijakan Turki. Peningkatan jumlah pengungsi telah

menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan di beberapa wilayah di Turki. Hal ini mendorong pemerintah Turki untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban tersebut, termasuk dengan mengembalikan sebagian pengungsi ke Suriah.

Pengaruh Sosial

Tekanan yang didapat oleh warga lokal Turki akibat adanya para pengungsi menimbulkan dampak yang kompleks karena adanya masyarakat yang merasa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Turki. Akibat ketidakstabilan ekonomi, adanya pengungsi membuat persaingan antara penduduk lokal dan pengungsi dalam mendapatkan pekerjaan. Data yang ada menunjukkan tingkat pengangguran di Turki pada tahun 2019 memasuki level tertinggi mencapai 13,7% yang mana persentase rata-rata pengangguran dari tahun sebelumnya pada tahun 2011 mencapai 9,1%, (Ahmad 2019). Adanya peningkatan tersebut membuat masyarakat lokal mengalami kesulitan untuk mempertahankan usaha mereka karena tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan kecilnya pemasukan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Data menunjukkan tingkat pengangguran warga lokal lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran warga pengungsi. Pemerintah Turki telah berusaha untuk memfasilitasi integrasi ekonomi pengungsi ke dalam pasar tenaga kerja, terutama dengan mengizinkan pengungsi Suriah untuk bekerja di sektor-sektor tertentu. Namun, pengungsi ini menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pekerjaan karena berbagai faktor, termasuk kendala bahasa, status legal, diskriminasi, dan kesulitan dalam pengakuan kualifikasi pendidikan mereka, menghalangi mereka dalam mencari pekerjaan yang layak. Pada saat yang sama, pengangguran di antara warga lokal Turki juga merupakan masalah yang signifikan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan akses terbatas terhadap peluang ekonomi (Dora 2020). Oleh karena itu, pengelolaan pasar tenaga kerja di Turki melibatkan sejumlah tantangan, termasuk penyeimbangan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap pekerja lokal dan integrasi yang adil bagi pengungsi.

Penurunan upah pendapatan dari berbagai sektor juga mempengaruhi perubahan kebijakan ini. Banyak pengungsi yang menjalankan pekerjaannya dengan upah yang lebih rendah dari pada upah warga lokal

Turki. Hal itu membuat berbagai sektor lebih memilih menggunakan jasa para pengungsi yang ingin bekerja dengan upah lebih rendah daripada jasa warga lokal Turki. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menemukan bahwa banyak pengungsi mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor seperti pertanian, konstruksi, dan layanan kelas bawah, dengan upah minimum (Tumen 2023). Hal tersebut memunculkan ketegangan antara warga lokal dan pengungsi karena adanya sentimen anti pengungsi. Kebanyakan warga lokal merasa adanya persaingan dalam hal sumber daya ketenagakerjaan yang mana lebih banyak pengungsi yang dipekerjakan dibandingkan penduduk lokal. Perbedaan budaya juga menjadi salah satu pemicu sentimen warga lokal terhadap pengungsi yang mana dari segi komunikasi terdapat perbedaan bahasa antar keduanya, mengakibatkan susah beradaptasi serta komunikasi untuk satu sama lain.

Kemudian, dari segi sosial bidang layanan publik, terdapat kecemburuan yang dirasakan oleh warga lokal mengenai perhatian yang diberikan pemerintah untuk para pengungsi. Ini menimbulkan adanya sentimen anti pengungsi karena warga lokal merasa bahwa para pengungsi diberikan berbagai fasilitas yang membuat akses fasilitas warga lokal jadi terhambat seperti di bidang pendidikan di mana kapasitas berbagai universitas dan sekolah menjadi terbatas karena jumlah siswanya lebih banyak karena peningkatan jumlah pengungsi. Pada bidang infrastruktur, banyaknya pengungsi yang masuk mengakibatkan kepadatan penduduk yang membebani fasilitas kota, jalanan, air bersih, listrik dan pembangunan. Adanya pengungsi yang meningkat juga membuat banyaknya permintaan perumahan yang mengakibatkan harga sewa serta properti menjadi lebih mahal. Hal ini membuat tempat tinggal dengan harga terjangkau sulit ditemukan. Tak hanya itu, ketidakpastian identitas nasional juga berpengaruh karena para pengungsi yang tinggal di Turki mendapatkan akses dan hak warga negara, tetapi banyak dari mereka tidak memiliki izin tinggal dan identitas yang jelas (Ramansyah 2020).

Besarnya kehadiran pengungsi Suriah di Turki menyebabkan perubahan demografi di beberapa wilayah, khususnya di wilayah perbatasan dengan Suriah. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Tantangan dalam mengintegrasikan pengungsi Suriah ke dalam masyarakat Turki juga dapat menjadi faktor sosial yang mempengaruhi kebijakan repatriasi. Ketika terdapat ketidakpastian atau ketegangan dalam proses integrasi sosial

dan budaya, pemerintah mungkin lebih cenderung mencari solusi dengan mengurangi jumlah pengungsi internal. Reaksi masyarakat terhadap kehadiran pengungsi Suriah juga mempengaruhi kebijakan repatriasi. Terkait jaminan sosial repatriasi pengungsi Suriah, pemerintah mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah pengungsi di negara tersebut untuk mengurangi kekhawatiran akan terjadinya konflik sosial atau kejahatan terkait kehadiran pengungsi.

Pengaruh Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Turki menjadi pemicu lain bagi perubahan kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah. Pada awalnya, kondisi perekonomian Turki memang tidak terlalu stabil atau berkembang dengan pesat disebabkan adanya beban ekonomi yang dirasakan setelah masuknya pengungsi Suriah ke Turki dengan jumlah pengungsi paling banyak di antara negara lainnya dengan total sekitar 3,6 juta pengungsi (Sicak & Caliskan 2019). Terdapat biaya yang dikeluarkan oleh Turki untuk membantu menangani para pengungsi dengan mengeluarkan anggaran negara hingga mencapai USD 7,6 miliar sejak April hingga Oktober 2015. Dalam jumpa pers dengan wartawan negara-negara Uni Eropa pada 2 Maret 2016, Fuad Oktay, ketua Disaster and Emergency Management (AFAD), menyatakan bahwa Turki telah membangun 26 kamp pengungsi yang memiliki fasilitas medis dan sekolah gratis dan telah menghabiskan USD 10 miliar untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi (Tsarouhas 2023). Anggaran dikeluarkan untuk memenuhi fasilitas jaminan kesehatan, kebutuhan pokok serta berbagai kebutuhan penampungan para pengungsi lainnya. Perekonomian menjadi tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir karena adanya inflasi yang tinggi pada September inflasi yang mencapai 83,5% dan kenaikan berbagai harga komoditas dan bahan makanan yang menjadi beban bagi masyarakat sehingga membuat kurangnya daya beli (CNBC 2022).

Selain itu, konflik mengganggu perdagangan di Turki, Suriah, dan beberapa negara Arab lainnya. Setelah krisis Suriah, bisnis impor dan ekspor Turki dan Suriah juga menurun. Ekspor Turki ke Suriah pada tahun 2010 sebesar USD 1.844.605, tetapi pada tahun 2011 turun menjadi USD 1.609.861. Perekonomian dan masyarakat Turki terkena dampak gelombang pengungsi Suriah karena pemerintah mengalokasikan dana

keuangan publik untuk membantu memfasilitasi kebutuhan para pengungsi. Sejak tahun 2011, Turki telah memberikan 1% dari total pengungsi Suriah di bawah perlindungan sementara. Nilai tukar lira jatuh drastis di mana mulai tahun 2013 mengalami penurunan hingga 40%. Adanya peningkatan defisit neraca transaksi berjalan pada bulan Agustus yang meningkat tiga kali lipat daripada tahun sebelumnya. Ketergantungan pada impor membuat situasi ekonomi negara Turki menjadi lebih buruk (Ulfah 2022).

Dari segi finansial, pemerintah Turki mengeluarkan banyak uang untuk membantu pengungsi. Pada tahun 2019, Turki diperkirakan mengeluarkan sekitar USD 40 miliar. Pemerintah tidak dapat berinvestasi di bidang lain seperti infrastruktur dan proyek pembangunan karena beban keuangan ini. Meskipun Uni Eropa memberikan kontribusi sebesar €6 miliar melalui Fasilitas untuk Pengungsi di Turki, pejabat Turki menganggap kontribusi ini tidak cukup untuk menutupi biaya yang diperlukan untuk menampung semua pengungsi (Kirişci 2021). Kondisi pertumbuhan ekonomi yang lambat atau negatif dapat memicu pemerintah untuk melakukan perubahan dalam mengurangi beban ekonomi suatu negara seperti keadaan ekonomi Turki yang menanggung beban untuk kebutuhan para pengungsi dan memfasilitasi dalam hal layanan sosial, bantuan kemanusiaan serta infrastruktur. Dalam ketimpangan ekonomi Turki, para penduduk lokal merasa terabaikan karena pemerintah lebih berfokus pada para pengungsi dibandingkan warga lokal yang harus lebih diprioritaskan. Dari segi ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran yang tinggi, adanya pengungsi juga mengakibatkan tekanan pada infrastruktur Turki dalam hal transportasi, pendidikan, layanan kesehatan dan juga perumahan yang mana infrastruktur Turki kurang mengalami kemajuan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil serta berbagai tekanan yang terjadi menimbulkan sebuah perubahan kebijakan Turki untuk mengurangi jumlah pengungsi yang ada di Turki dengan mengeluarkan kebijakan repatriasi untuk mengurangi beban ekonomi Turki.

Pengaruh Politik

Menurunnya pengaruh partai AKP (Adelet ve Kalkunma Partisi [Partai Keadilan dan Pembangunan]) juga berperan dalam perubahan kebijakan luar negeri Turki terkait pengungsi. Adanya perubahan sistem pemerintahan

dapat mempengaruhi sebuah kekuatan partai. AKP yang muncul pada 2001 dan diusung oleh Recep Tayyip Erdogan sejak tahun 2002-2015 selalu memenangkan pemilihan umum (Chrisella 2022). Sebagai partai penguasa, AKP mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dibandingkan partai lainnya. Penerapan kebijakan "Pintu Terbuka" tidak lepas dari pengaruh Partai AKP. Partai AKP berusaha mempengaruhi pemerintah untuk menerima pengungsi Suriah. Hal ini didasari oleh persaudaraan yang berujung pada jati diri, khususnya sebagai umat Islam. Pengungsi Suriah dianggap muhajirin sebagai pengungsi yang meninggalkan negaranya karena merasa terancam dengan tindakan rezim Bashar Al-Assad. Pemberian status hukum dan naturalisasi kepada pengungsi oleh pemerintah juga didukung oleh AKP. Naturalisasi adalah proses di mana pengungsi Suriah yang telah tinggal di Turki selama jangka waktu tertentu dapat menjadi penduduk Turki. Di balik pemberian kewarganegaraan kepada pengungsi, secara tidak langsung AKP meraih lebih banyak suara di pemilu. Keberadaan partai AKP mempengaruhi kebijakan pemerintah karena Erdogan dan AKP mempunyai kesamaan visi dan misi. Oleh karena itu, kebijakan Erdogan merupakan saran dari partainya (Suryantama, 2021).

AKP menganggap dirinya sebagai partai politik dengan filosofi yang berbeda dari partai politik lainnya. Ideologinya mendukung pendekatan politik yang moderat yang menghargai penerapan prinsip-prinsip umum mayoritas negara di seluruh dunia sambil mempertimbangkan sejarah Turki. Dari kemenangan mereka pada pemilu 2002, AKP mulai memainkan peran penting dalam perpolitikan Turki dengan mendapatkan 367 kursi dari total 550 kursi di parlemen. Pemilu 2011 menunjukkan kemenangan AKP dengan memperoleh 49,9%, mengalahkan Cumhuriyat Halk Partisi (CHP) dengan 25,9% dan Miliyetci Harekat Partisi (MHP) dengan 12,9%. Sampai pemilu 2019, AKP tetap menang dengan 51,6% suara nasional bersama aliansinya, tetapi kalah di beberapa kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir (Terry 2021).

Namun, setelah referendum 2017, terjadi pergeseran perspektif masyarakat terhadap partai AKP. Sejak sistem berubah menjadi presidensial, anggota partai tidak bisa lagi mengkritik publik dan kepercayaan publik pada partai AKP menurun. Ini terbukti dengan banyaknya pergantian walikota di beberapa kota, termasuk kota-kota besar seperti Ankara dan Istanbul, dan pada Maret 2019, banyak walikota yang digantikan. Pilkada

2019 menunjukkan bagaimana sistem presidensial mempengaruhi politik Turki, dengan AKP mempertimbangkan untuk mendapatkan kendali penuh atas kota-kota negara. Namun, 40% dari masyarakat metropolitan Turki memilih partai oposisi sebagai pemimpin daerah. Berdasarkan survei, AKP mengalami fluktuasi sekitar 28,5%–35% sejak awal 2020. Sementara itu, MHP tetap pada 6,7%–8,5% (Sya' and Rofii 2018).

Opini masyarakat Turki mengenai kehadiran pengungsi Suriah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan terjadinya peningkatan ketegangan atau ketidakpuasan di masyarakat mengenai besarnya kehadiran pengungsi, pemerintah merespons dengan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah pengungsi di negara tersebut sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Turki dan partai politik yang berkuasa mempertimbangkan dampak politik dari kebijakan terhadap pengungsi Suriah terutama dalam konteks pemilu atau dukungan politik. Kebijakan pengungsi menjadi isu penting dalam politik dalam negeri dan perubahan kebijakan dilihat sebagai upaya untuk memenuhi janji pemilu atau mempertahankan dukungan politik (Hasly 2024). Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah di mana banyak pengungsi Suriah tinggal juga mempengaruhi kebijakan repatriasi. Kebijakan terkait pengungsi Suriah juga dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan nasional. Terdapat kekhawatiran mengenai potensi ancaman keamanan terkait dengan kehadiran pengungsi sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah pengungsi internal untuk menjaga keamanan nasional.

Faktor Internasional

Faktor ini mengacu pada perubahan sistemik yang dapat menyebabkan penyesuaian kembali kebijakan luar negeri dengan peran negara yang lain yang dapat mengaktifkan perubahan kebijakan luar negeri (Blavoukos and Bourantonis 2014). Faktor internasional yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki terkait pengembalian pengungsi Suriah antara lain adalah adanya tekanan dari negara-negara Eropa terkait jumlah pengungsi yang masuk ke wilayah mereka. Turki juga merasa terbebani dengan jumlah pengungsi yang tinggi dan ingin mengurangi tekanan tersebut dengan mengembalikan sebagian pengungsi ke Suriah. Selain itu, adanya perubahan dinamika politik dan keamanan di Suriah juga mempengaruhi kebijakan

luar negeri Turki. Adanya perubahan internasional didorong oleh beberapa hal seperti adanya pengaruh kerja sama Turki dan Uni Eropa (UE) yang berakhir menjadi perselisihan antar keduanya dan adanya pengaruh inflasi mata uang USD.

Pengaruh Komitmen Kerjasama Turki dan UE

Kerjasama Uni Eropa dengan Turki dimulai pada 2016 dan berpuncak pada Deklarasi UE-Turki tentang bentuk baru kerjasama Uni Eropa yang disepakati pada 18 Maret 2016 untuk mencegah arus migrasi akibat aktivitas ilegal dan menyempurnakan aturan perlindungan pengungsi. Jalur kedatangan para pengungsi ke Eropa melewati Laut Mediterania di barat, di tengah, dan di timur. Uni Eropa memberi Turki kekuatan untuk memutuskan kebijakannya untuk mencegah pengungsi memasuki Uni Eropa (Ulfah 2022). Pasca implementasi deklarasi, UE-Turki merespon positif, antara lain dengan mengurangi jumlah pengungsi dari 390.000 menjadi 5.687 pada 2015-2016. Dampak dari Deklarasi UE-Turki juga terlihat pada penurunan jumlah pengungsi yang tiba di Uni Eropa, yaitu sebanyak 1.943 orang pada tahun 2016-2017. Selain mencegah masuknya pengungsi ke Uni Eropa, Turki juga mengembangkan kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Orang Asing (LFIP) dan Ordonansi Perlindungan Sementara (TPR) yang memberikan berbagai layanan kepada pengungsi di Turki. Kebijakan perlindungan pengungsi Turki mencakup layanan nasional seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya (Chrisella 2022). Dalam hal ini, Turki juga bekerja sama dengan PBB, lembaga keuangan internasional (IFI), dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah internasional.

Namun, kerjasama antara Uni Eropa dan Turki tidak berjalan dengan baik karena terdapat kesalahpahaman yang mengakibatkan kerjasama tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Ada berbagai tuduhan terhadap Turki mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengungsi. Turki diduga memperlakukan pengungsi secara tidak baik, terdapat laporan mengenai perilaku Turki yang melakukan penahanan arbitrari, deportasi paksa, serta keterbatasan akses pengungsi terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, ada laporan yang menyoroti kondisi kamp-kamp pengungsi yang dianggap tidak memadai. UE dan berbagai organisasi hak asasi manusia telah mengkritik Turki terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Turki sering kali membantah tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai kesalahpahaman atau propaganda negatif yang tidak berdasar.

Gesekan UE-Turki ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, perbedaan pendekatan antara Turki dan UE terhadap penanganan pengungsi. Turki cenderung menginginkan dukungan finansial yang lebih besar dari UE untuk menangani jumlah pengungsi yang masuk ke negaranya, sementara UE lebih fokus pada penanganan pengungsi di dalam wilayah Eropa. Kedua, adanya perbedaan pandangan politik antara Turki dan UE juga memperumit kerja sama dalam penanganan pengungsi. Misalnya, sikap Turki terkait isu keamanan dan kebijakan dalam konflik Suriah tidak selalu sejalan dengan kebijakan UE, sehingga hal ini menimbulkan ketegangan di antara keduanya. (Sholihin and Alfian 2021).

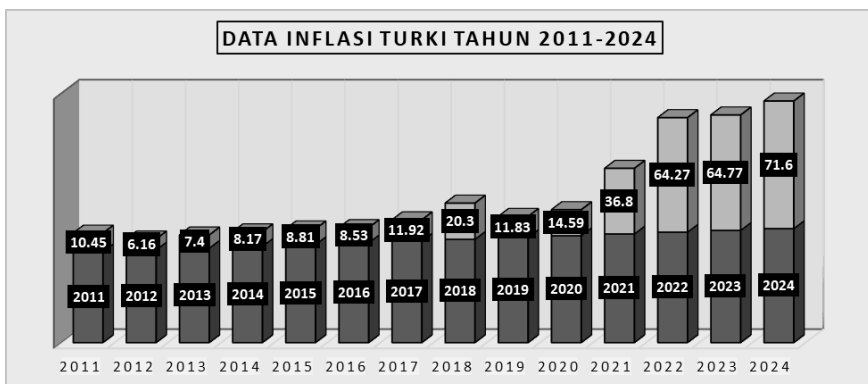
Ketiga, ketegangan antara Turki dan Uni Eropa (UE) terkait hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi mempengaruhi kerja sama dalam menangani krisis pengungsi. Perjanjian Migrasi UE-Turki 2016 menjadi sumber konflik, dengan UE menuduh Turki melanggarnya. Upaya Turki untuk bergabung dengan UE juga mengalami hambatan karena isu hak asasi manusia dan otoritarianisme. UE menekan Turki untuk menampung pengungsi Suriah, sementara Turki merasa pendanaan dan dukungan dari UE tidak mencukupi.

Ketegangan hubungan bilateral antara Turki dan beberapa negara anggota UE berdampak pada dinamika kebijakan pengungsi. Perselisihan diplomatik, sengketa wilayah, dan perbedaan politik antara Turki dan beberapa negara anggota Uni Eropa telah menimbulkan ketegangan dan mempengaruhi kerja sama dalam menangani krisis pengungsi. Ketegangan antara kedua negara semakin meningkat akibat kritik Uni Eropa terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Turki, khususnya isu-isu seperti penahanan jurnalis dan aktivis. Masalah-masalah ini memperumit hubungan Turki dengan Uni Eropa dalam konteks kebijakan pengungsi. Ketegangan antara Turki dan Uni Eropa telah menciptakan lingkungan politik yang kompleks dan sulit dengan pendekatan yang berbeda dan konflik kepentingan dalam menangani krisis. Konflik Suriah menjadi perhatian khusus di mana kedua negara lebih memprioritaskan kerja sama ekonomi dibandingkan hubungan strategis yang menyebabkan perselisihan dalam krisis regional yang penanganannya antara masalah strategis dan ekonomi dilakukan secara terpisah (Ulfah 2022).

Pengaruh Inflasi pada Mata Uang USD

Inflasi mata uang dolar menjadi salah satu pendorong perubahan kebijakan luar negeri Turki. Adanya tekanan ekonomi akibat penurunan nilai mata uang mengakibatkan naiknya inflasi yang tinggi. Peningkatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Turki menyebabkan harga impor lebih tinggi dan berkontribusi terhadap inflasi di Turki. Perubahan harga komoditas global seperti minyak mentah, logam, dan pangan juga dapat mempengaruhi inflasi di Turki. Jika harga komoditas global naik dalam dolar AS, maka Turki menghadapi tekanan inflasi sebagai importir bersih beberapa produk. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Federal Reserve AS mempengaruhi inflasi Turki (Ramansyah 2020). Misalnya, jika Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, hal ini dapat menyebabkan masuknya modal dari negara-negara berkembang, termasuk Turki, yang dapat mengevaluasi mata uang lokal dan meningkatkan inflasi. Situasi ekonomi global juga dapat mempengaruhi inflasi Turki.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, meningkatkan permintaan barang dan jasa Turki dan mempercepat inflasi. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dapat menurunkan permintaan ekspor Turki dan mengekang inflasi. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi inflasi di Turki melalui pengaruh langsung atau tidak langsung dari nilai tukar dolar AS, harga komoditas, kebijakan moneter AS, pertumbuhan ekonomi global, serta ketidakpastian politik dan geopolitik. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Turki seringkali perlu mempertimbangkan dinamika kompleks dari faktor-faktor ekonomi internasional tersebut.



Grafik 2 Inflasi Turki Tahun 2011-2024

Sumber: Turkish Statistical Institute (2024)

Grafik 2 menunjukkan bahwa inflasi di Turki mengalami fluktuasi signifikan dari tahun 2011 hingga 2024. Pada awal 2011, inflasi berada di sekitar 4,9%, kemudian meningkat menjadi 10,45% di akhir tahun. Tahun 2012 mencatat penurunan inflasi hingga 6,37%, tetapi kembali naik menjadi 7,4% pada 2013 dan terus meningkat ke 8,17% pada 2014. Selama 2015–2016, inflasi stabil di 8,53%, namun meningkat menjadi 11,92% pada 2017. Inflasi melonjak drastis pada 2018, mencapai 20,3%, sebelum turun ke 11,83% pada 2019.

Pada 2020, inflasi kembali naik ke 14,59%, diikuti oleh lonjakan tajam pada 2021 sebesar 36,8%. Tren kenaikan berlanjut pada 2022 dengan inflasi mencapai 64,27%, meningkat sedikit menjadi 64,77% pada 2023, dan mencapai puncaknya pada Juli 2024 di 71,6%. Ketidakstabilan ini mencerminkan perubahan yang terus terjadi dalam perekonomian Turki.

Dalam Indeks Harga Konsumen Turki, makanan dan minuman non-alkohol memiliki kontribusi terbesar (25%), diikuti oleh transportasi (17%), serta perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya (14%). Kategori lain termasuk perabot dan peralatan rumah tangga (9%), hotel, kafe, dan restoran (7%), pakaian dan sepatu (6%), serta barang dan jasa lainnya (5%). Indeks ini juga mencakup komunikasi (4%), makanan beralkohol dan tembakau (4%), serta pendidikan (2%) (Turkish Statistical Institute, 2024).

Inflasi yang tinggi dapat memicu peningkatan pengangguran. Kenaikan biaya hidup seiring dengan laju inflasi yang cepat dapat mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan konsumen dan bisnis mungkin memangkas pengeluaran, yang berpotensi menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa. Akibatnya, penurunan produksi dan penjualan perusahaan dapat memicu pemotongan tenaga kerja atau bahkan penutupan usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran dapat meningkat. Namun, hubungan antara inflasi dan pengangguran bisa sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, inflasi yang berkaitan dengan peningkatan pengangguran menimbulkan potensi masalah sosial yang lebih besar dan menjadi beban bagi Turki. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penting bagi Turki dalam meninjau kebijakan terkait pengungsi yang berada di wilayahnya.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki dalam repatriasi pengungsi dipengaruhi oleh dua tingkat analisis: domestik dan internasional. Pada tingkat domestik, faktor-faktor yang berperan meliputi dinamika sosial yang berdampak pada keamanan nasional, tantangan ekonomi, serta tekanan politik dalam negeri. Sementara itu, pada tingkat internasional, kebijakan ini dipengaruhi oleh hubungan Turki dengan Uni Eropa (UE) dalam kerangka kerja sama, serta fluktuasi nilai tukar USD yang berdampak pada perekonomian Turki. Antara tahun 2011 hingga 2019, berbagai tekanan seperti perubahan pemerintahan, meningkatnya beban ekonomi akibat pengungsi, dan kebutuhan menjaga stabilitas negara mendorong Turki untuk menerapkan kebijakan repatriasi guna mengurangi dampak pengungsi terhadap negara. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala saat pandemi COVID-19 pada 2019. Meskipun demikian, dengan berbagai penyesuaian protokol, Turki tetap melanjutkan kebijakan repatriasi sesuai dengan kondisi yang ada.

Hingga saat ini, kebijakan repatriasi masih berlangsung, yang terlihat dari penurunan signifikan jumlah pengungsi di Turki. Penelitian ini membatasi analisis pada faktor domestik dan internasional yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki dalam isu repatriasi pengungsi.

Referensi

- Ahmad, Farid. 2019. "Angka Pengangguran di Turki Melonjak, Tertinggi dalam Satu Dekade Terakhir | Internasional." *Gatra.Com*. Retrieved May 4, 2024 (<https://www.gatra.com/news-410602-Internasional-angka-pengangguran-di-turki-melonjak-tertinggi-dalam-satu-dekade-terakhir.html>).
- Alifah, S, and Widad, R. 2022. "Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Pengungsi Suriah dalam EU-Turkey Statement On Migration Deal (Periode 2016-2020)."
- Anissa, A. 2021. "Analisis *Balance of Interest* dalam Studi Kasus Kepentingan Turki Melakukan Kerja Sama dengan Rusia di Suriah pada 2016 – 2019", *Nation State: Journal of International Studies*, 4(1): 18 - 34. doi: 10.24076/nsjis.v4i1.423.

- Blavoukos, S., and D. Bourantonis. 2014. "Identifying Parameters of Foreign Policy Change: An Eclectic Approach." *Cooperation and Conflict* 49(4):483–500. doi: 10.1177/0010836713517568.
- Chrisella, S. D. 2022. "Komitmen Uni Eropa dalam Pemenuhan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Negara-Negara Anggota (Studi Kasus Krisis Pengungsi di Yunani Pascakebakaran Kamp Moria)." *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)* 7(2):68–83. doi: 10.20961/BELLI.V7I2.59996.
- CNBC. 2022. "Inflasi dan Kurs Turki Kacau, Negara Diambang Kebangkrutan." *CNBC Indonesia*. Retrieved May 4, 2024 (<https://www.cnbcindonesia.com/research/20221025080250-128-382244/inflasi-dan-kurs-turki-kacau-negara-diambang-kebangkrutan>).
- Delfira, I. P. 2019. "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Imigran." *Doctoral Dissertation, Universitas Andalas*.
- Dora, Z. 2020. "International Migrants As A Matter Of Security: Open Door Policy and Syrians in Turkey." *Güvenlik Bilimleri Dergisi* 9(2):501–24. doi: 10.28956/gbd.830065.
- Dorian. Jones. 2023. "Jadi Negara Penampung Pengungsi Terbesar Di Dunia, Turki Mulai Merasakan Tekanan." Retrieved May 4, 2024 (<https://www.voaindonesia.com/a/jadi-negara-penampung-pengungsi-terbesar-di-dunia-turki-mulai-merasakan-tekanan/7145630.html>).
- Fawwaz, M., S. Rizqullah, J. Putri, S. Afridita, and H. Purnomo. 2020. "Syrian Refugees in Turkey: Implementation of Turkey Open Door Policy in Dealing with Syrian Refugees." *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 3(02):111–24. doi: 10.37680/MUHARRIK.V3I02.394.
- Hasly, M. H. 2024. "Kebijakan Luar Negeri Turki Atas Pemberlakuan Visa Terhadap Pengungsi Suriah." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11(7):2746–56. doi: 10.31604/JIPS.V11I7.2024.2746-2756.
- Husna, N., Rosyidin, M., Sos, S., & Alfian, M. F. 2022. "Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil Era Bolsonaro dalam Isu Lingkungan Global." *Journal of International Relations* (Vol. 8). <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihihttp://www.fisip.undip.ac.id>

- Izzatinnisa, I. 2022. "Repatriasi Pengungsi Suriah: Perubahan Kebijakan Turki Merespon Krisis Pengungsi." *PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)* 1(1).
- Kemal, Kirişci. 2021. "As EU-Turkey Migration Agreement Reaches the Five-Year Mark, Add a Job Creation Element". *Brookings* <https://www.brookings.edu/articles/as-eu-turkey-migration-agreement-reaches-the-five-year-mark-add-a-job-creation-element/>
- Makovsky, Alan. 2019. "Turkey's Refugee Dilemma - Syria Regional Refugee Response: Turkey." *Center for American Progress*. Retrieved April 1, 2024 (<https://www.americanprogress.org/article/turkeys-refugee-dilemma/>).
- Olejárová, Barbora, and Mgr Barbora Olejárová. 2018. "The Great Wall of Turkey: From „The Open-Door Policy” to Building Fortress?" *Border and Regional Studies* 6(2):117–33. doi: 10.25167/PPBS55.
- Putri, Amalia. 2015. "Kebijakan Turki dalam Menampung Pengungsi Korban Perang Saudara Suriah Tahun 2011 - 2013." *Journal of International Relations* 1(1):1–15.
- Ramansyah, M. I. ., Hanie, S. R. P. ., & Falah, M. G. 2020. "View of The Role of Syrian Refugees on Turkey Dynamics Economic Development in 2014-2020 with a Spill-Over Effects Approach." *Frequency of International Relations (FETRIAN)*. Retrieved May 14, 2024 (<http://fetrian.fisip.unand.ac.id/index.php/fetrian/article/view/231/27>).
- Rofii, Moh. Sya'roni. 2018. "Potret Diplomasi Turki Menuju Keanggotaan Tetap Uni Eropa." *Jurnal Interdependence Hubungan Internasional* Vol. 5 (2).
- Rosyana, Firda, and Windy Dermawan. 2020a. "Geopolitik Dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki." *Jurnal ICMES* 4(1):86–102. doi: 10.35748/JURNALICMES.V4I1.74.
- Roynanda, Novrizal. 2019. "Kebijakan Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi: Analisis Sekuritisasi dalam Pembentukan EU-Turkey Statement." *Skripsi, UII*, retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14225?show=full>

- Sholihin, Fitri, and Rama Fernandhy Alfian. 2021. "Bumerang Kerjasama EU-Turkey Joint Action Plan Terkait Penanganan Krisis Pengungsi Terhadap Turki." *Jurnal Sosial Politik* 7(2):254–70. doi: 10.22219/sospol.v7i2.16098.
- Sicak, Ahmet Sait, and Necmettin Çaliskan. 2019. "İnsan Şahsiyetinin İnşası ve Korunması Bağlamında Kur'ân'da Sığınma Realitesinin İsimlendirilmesi." *Tefsir Araştırmaları Dergisi* 3(1):140–68. doi: 10.31121/TADER.555746.
- Suryantama, Muhammad Dary. 2021. "Turkey's Open-Door Policy for Syrian Refugees: Humanity Motive and Political Motive." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 2(2):62–70. doi: 10.15408/jisi.v2i2.24927.
- Syukran, and Ubaidullah. 2019. "The Impact of Turkey Open Door Policy for Turkey Refugees on Turkey's National Interest in 2011-2016 (Case Study of Syrian Refugees in Turkey)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4(4).
- Terry, Kyilah. 2021. "Kesepakatan Uni Eropa-Turki, Lima Tahun Kemudian: Sebuah Pertikaian." *Migration Policy*. Retrieved July 21, 2024 (<https://www.migrationpolicy.org/article/eu-turkey-deal-five-years-on>).
- Tsarouhas, Dimitris. 2023. "The Critical Role of Turkey in the Management of the Syrian Refugee Crisis Written by Dimitris Tsarouhas The Critical Role of Turkey in the Management of the Syrian Refugee Crisis." *E-International Relations*, retrieved from <https://www.e-ir.info/2023/05/06/the-critical-role-of-turkey-in-the-management-of-the-syrian-refugee-crisis/>
- Tumen, Semih. 2023. "The Case of Syrian Refugees in Türkiye: Successes, Challenges, and Lessons Learned." Retrieved from <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a007833298df4b9c3735602711dd9289-0050062023/original/WDR2023-Turkey-case-study-FORMATTED.pdf>
- Turkish Statistical Institute. 2024. "Turki - Tingkat Inflasi | 1965-2024 Data | 2025-2026 Perkiraan." *Trading Economics*. Retrieved June 10, 2024 (<https://id.tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi>).

- Ulfah, Nidah Kholidia. 2022. "Faktor-Faktor Kegagalan Kerjasama European Union (EU) dan Turki dalam Menangani Krisis Pengungsi di Benua Eropa." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6):7698–7707. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9574>
- UNHCR. 2013. "Syria Regional Response Plan." Retrieved (<https://www.unhcr.org/publications/syria-regional-response-plan-january-december-2013>)
- UNHCR. 2019. "UNHCR Turkey - Fact Sheet July 2019 - Türkiye." Retrieved May 6, 2024 (<https://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-fact-sheet-july-2019>).
- UNHCR. 2022. "Refugee Statistics | USA for UNHCR." Retrieved July 21, 2024 (<https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/>).
- UNHCR. 2024. "UNHCR Türkiye - Pemukiman Kembali." *UNHCR Türkiye*.
- UNICEF. 2022. "Syria Crisis Humanitarian Situation Report March 2022." Retrieved (<https://www.unicef.org/documents/syrian-crisis-humanitarian-situation-report-march-2022>).
- Voluntas. 2019. "State of the Syria Crisis Response: Assessing Humanitarian and Development Challenges."
- Wardana, Adhi. 2017. "Upaya Pemerintah Turki untuk Bergabung dengan Uni Eropa." *Global Political Studies Journal* 1(2):107–23. doi: 10.34010/GPSJOURNAL.V1I2.2015.
- Yosepha, Pusparisa. 2020. "Turki, Negara Penerima Pengungsi Terbesar di Dunia." Retrieved (<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/100ff488c2096ab/turki-negara-penerima-pengungsi-terbesar-di-dunia>).

